

# Profetika

JURNAL STUDI ISLAM

Vol. 14, No. 1, Juni 2013

ISSN 1411-0881

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi ii

**EPISTEMOLOGI POLITIK ISLAM  
TENTANG WEWENANG DAN KEKUASAAN**  
Muhammad Azhar 1 - 8

**PROSPEK PARTAI ISLAM IDEOLOGIS DI INDONESIA**  
SudarnoShobron 9 - 24

**KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA  
(StudiKasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan)**  
M. Syabli ZA,Aidul Fitriciada Azhari, Syamsul Hidayat 25 - 38

**TOLERANSI MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA  
DALAM KEBERAGAMAAN, SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK**  
Budi Prasetyo 39 - 51

**DINAMIKA PENAFSIRAN AL-QURAN DI SURAKARTA: 1900-1930**  
Akhmad Arif Junaidi 52 - 65

**MERAJUT KERUKUNAN DALAM KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA  
(Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)**  
Moh Abdul KholiqHasan 66 - 77

**PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH**  
Imron Rosyadi 78 - 89

**STRATEGI MENGISLAMKAN KEMBALI KOMUNITAS KRISTEN DI LERENG  
GUNUNG SEMERU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**  
Harno Purwanto, M. Muinudinillah Basri 90 - 102

## PENGANTAR REDAKSI

Peristiwa yang menimpa beberapa Negara Islam misalnya Afghanistan, Irak, Tunisia, Sudan, Mesir dan Suriah memberikan gambaran betapa rapuhnya system politik yang diterapkan, sehingga memberikan peluang asing dan rakyat melakukan perlawanan politik terhadap penguasa yang sah, terlepas sang penguasa ditengarai sebagai seorang diktator. Islam sebagai system politik telah memberikan gambaran yang jelas tentang hak dan tanggungjawab terhadap penguasa begitu juga hak dan tanggungjawab sebagai rakyat. Sejarah perjalanan Rasulullah saw dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan kenabian juga terpampang dengan jelas. Namun rupanya al-Qur'an dan perjalanan sejarah kehidupan nabi Muhammad saw tidak menjadi rujukan dalam kehidupan berpolitik, sehingga para penguasa selalu bernafsu untuk terus berkuasa tanpa dibatasi oleh waktu, dan kalau dapat dipertahankan kekuasaan tersebut sampai anak dan cucunya. Sementara rakyat dan orang-orang yang memiliki kepentingan "tidak sabar" menunggu proses pergantian pimpinan secara wajar melalui proses-proses musyawarah atau demokrasi.

Profetika sebagai jurnal studi Islam di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta selalu menghadirkan artikel-artikel reflektif dan berbasis penelitian yang menganalisis ajaran Islam secara normatif, namun juga melihat realitas pelaksanaan ajaran Islam dalam tataran historis baik yang berkenaan dengan politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, maupun masalah aktual lainnya yang menjadi perbincangan dalam masyarakat ilmiah.

Profetika Volume 14 nomor 1 Juni 2013 ini memuat artikel-artikel tentang keislaman normatif dan historis yang dipilah menjadi 3 kelompok keilmuan, yakni sosial politik, tafsir, dan ushul fikih. Kelompok pertama tentang sosial politik ada empat artikel yang ditulis oleh Muhammad Azhar, Sudarno Shobron, M. Syabli ZA, dan Budi Prasetyo. Artikel pertama ditulis oleh Muhammad Azhar, dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), doktor dari Pascasarjana UIN Yogyakarta yang membahas tentang konsep wewenang dan kekuasaan dalam rangka mencari solusi politik Islam di masa depan. Azhar menganalisis pemikiran salah satu pemikir Islam kontemporer, Mohammed Arkoun. Disebutkan, *wewenang* adalah perasaan persekutuan mendalam yang mempersatukan para anggota suatu kelompok, suatu bangsa, suatu masyarakat yang terlibat dalam suatu tindakan revolusioner, atau dalam mengejar suatu upaya eksistensi, kobaran semangat atau mempertahankan jatidiri yang mereka letakkan dalam tradisi untuk membuka masa depan. Itulah paling kurang, lanjut Arkoun, model wewenang yang telah dicontohkan oleh para nabi, orang suci, pahlawan pembangun budaya, pemikir dan pencipta. Adapun *kekuasaan*, sebaliknya, cenderung memiliki, melestarikan, mengelola, memelihara suatu tatanan melalui kendala, berbagai batasan; apabila menggunakan persuasi, kekuasaan menyamakan mekanisme dan pertaruhan nyata untuk menghasilkan suatu ideologi pengabsahan yang menggunakan dengan kredibilitas yang kurang lebih besar, sumber-sumber dan pemegang wewenang yang lazim dipakai. Kekuasaan direbut

dan hilang; sedangkan wewenang sinambung dan diperkaya dengan berbagai ketentuan baru sepanjang kehadiran kelompok dalam sejarah.

Azhar berkesimpulan, Arkoun menolak nalar politik Humanistik (nalar sekuler), sebab melakukan pemisahan secara distinktif antara keduanya. Sebaliknya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Arkoun juga tidak bisa menerima adanya pensakralan kekuasaan (*power*) menjadi sama dengan politik kenabian bahkan menjadi sesuatu yang *ilāhiyyah* (nalar politik teokratik). Upaya pensakralan ini berdampak pada munculnya tirani religius sebagai dampak dari eksisnya oligarki politik keagamaan, sebagaimana terjadi di Iran.

Artikel kedua ditulis oleh Sudarno Shobron, doktor politik Islam dan dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengkritisi prospek partai Islam ideologis di Indonesia. Partai Islam ideologis yang telah sukses di masa lalu belakangan dihidupkan kembali. Partai-partai Islam muncul kembali di era reformasi yang memang memberikan peluang munculnya partai ideologis atau partai yang berazaskan Islam, misalnya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PPP. *Booming* partai politik sebagai bentuk euphoria pada era reformasi berdasarkan undang-undang partai politik diperbolehkan membuat ciri partai, salah satunya adalah ideologi partai. Analisis Sudarno dalam artikel ini memberikan jawaban tentang prospek partai Islam ideologis bahwa harapan besar umat Islam tidak segaris lurus dengan perilaku tokoh-tokoh partai dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kehidupan jagat perpolitikan di Indonesia tidak memberi harapan perbaikan kehidupan yang mensejahterakan rakyat. Kesuksesan suatu partai ideologis pada masa lalu belum dapat dijadikan ukuran akan diraihinya kesuksesan partai ideologis pada masa sekarang. Menghadirkan kembali partai ideologis yang hanya didasarkan pada romantisme merupakan kesalahan strategi, karena perubahan berpikir umat Islam telah bergeser akibat perkembangan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, diperkirakan pada pemilihan umum tahun 2014, partai ideologis belum dapat meraih suara signifikan dari umat Islam, karena ada perubahan berpikir sebagian umat Islam dari pola berpikir ideologis ke pragmatis.

Masih terkait dengan kehidupan sosial politik Islam di Indonesia, artikel ketiga membahas tentang konsep jihad dalam konteks negara bangsa dengan studi di Aceh, utamanya pasca perjuangan kemerdekaan. Artikel yang disusun berbasis riset ini oleh M. Syabli ZA, Aidul Fitriada Azhari, dan Syamsul Hidayat. Artikel ini menegaskan bahwa jihad dan negara bangsa memang dua konsep yang berbeda. Namun, para pendiri Negara Indonesia telah menemukan rumusan yang membuat dua konsep tersebut berjalan seiring dengan harmonis demi membangun sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep (formulasi) jihad dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada sejak awal pendirian negara Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa jihad merupakan makna asli (*original intent*) para pendiri negara dalam rangka mempertahankan Indonesia. Semangat mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia juga menguatkan hal tersebut, mulai dari munculnya Resolusi Djihad Nahdlatul Ulama, Poatoesan Moe'tamar Islam Indonesia, Moe'tamar Islam Soematra, Kiai dan Alim Ulama se-Jogjakarta, Mosi Rakjat Moeslimin Keboemen, dan seluruh komponen rakyat Indonesia semuanya menyerukan jihad untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan pemaknaannya, Jihad memang bisa saja berubah. Seperti

perkembangan pemaknaan *jihad-qital* di Aceh. Pada masa awal bergabung dengan Indonesia *jihad-qital* dimaknai dengan mengusir orang kafir serta penjajah zalim dari tanah air. Terlihat dari fase-fase penting setelah Aceh menjadi bagian dari NKRI, seperti halnya ketika muncul kekuatan DI/TII, *jihad-qital* dimaknai sebagai sebuah upaya mendirikan sebuah negara Islam yang lepas dari Indonesia. Tentu saja, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya adalah Aceh yang pada waktu itu tidak lagi menjadi bagian dari negara Indonesia karena perjanjian Renville. Perubahan paling ekstrim terjadi dalam konsepsi jihad di Aceh adalah ketika periode Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konsepsi jihad-qital telah berubah total, dari jihad guna membela agama berganti menjadi alat propaganda digunakan untuk melegitimasi usaha-usaha mendirikan Negara Aceh.

Artikel keempat membahas tentang "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Keberagaman, Sosial, Budaya dan Politik". Budi Prasetyo dalam penelitiannya menemukan data bahwa Majelis Mujahidin dalam memahami dan menerapkan toleransi tidak mengikuti perspektif Barat yang dijadikan acuan oleh kebanyakan orang pada saat ini. Majelis Mujahidin memahami konsep toleransi dengan perspektif syari'at, sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam al-Qur'an maupun hadis nabi, dan juga tindakan para shahabat. Toleransi ini adalah sikap lunak, dan lapang dalam urusan mu'amalah (sosial), bukan dalam persoalan aqidah dan ritual ibadah.

Kelompok kedua mengenai tafsir tergambar dalam dua artikel, yakni ditulis oleh Akhmad Arif Junaidi dan Abdul Kholiq Hassan. Menafsirkan al-Quran sebagai upaya memahami pesan-pesan Tuhan sering dipahami sebagai tugas yang tak pernah mengenal kata berhenti. Tugas tersebut senantiasa mesti dilakukan, kapan pun dan di mana pun, selaras dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial yang ada. Al-Quran harus senantiasa ditafsirkan untuk menjadi landasan teologis bagi setiap pemecahan persoalan aktual yang muncul ke permukaan. Makalah yang disarikan dari disertasi, Arif Junaidi menemukan penafsiran di tingkat lokal mengalami dinamika yang unik oleh karena konteks dan latar belakang masing-masing penafsir. Dinamika penafsiran al-Quran begitu intens di Surakarta dalam rentang waktu antara 1900-1930. Membandingkan tiga penafsir, artikel ini menemukan tiga karya tafsir yang sama-sama diproduksi di Surakarta memiliki *concern* yang berbeda. *Tafsîr al-Quran al-'Azim* lebih banyak menjadikan tema ortodoksi Islam sebagai isu sentral dari penafsiran-penafsirannya. Hal ini tentu bisa dimengerti karena karya tafsir tersebut ditulis oleh seorang pengulu ageng kraton yang banyak bergelut dengan hukum Islam. Sedangkan *Tafsîr Surat Wal Asri* lebih banyak menjadikan tema hubungan Islam-Kristen sebagai isu sentralnya. Penulis kitab ini tampak dirisaukan oleh kegiatan-kegiatan zending yang semakin meraja-lela di kawasan Kasunanan Surakarta. Kitab *Tafsîr Qur'an Djawen* menjadikan pentingnya ukhuwwah Islamiyyah sebagai isu utama penafsiran-penafsirannya. Kitab ini tampak banyak diuraikan fenomena perpecahan di kalangan umat Islam dikarenakan perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah furu'iyah.

Abdul Kholiq Hassan dalam artikelnya menekankan pentingnya saling memahami dan merajut kerukunan ditengah keragaman pengamalan beragama. Artikel ini dilatari oleh beberapa tahun terakhir ini kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama mendapat cobaan atau minimal sebuah *test case*. Dilihat dalam skala nasional terbaru

adalah kasus golongan Syiah di Sampang yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban dan ratusan orang mengungsi. Kalau dilihat dalam skala internasional adalah tragedi yang menimpa umat Islam yang terjadi di Myanmar. Sudah banyak teori yang digunakan para ahli untuk mengungkap kedua kasus tersebut. Abdul Kholiq Hassan mengajukan nilai-nilai Qurani yang dapat dijadikan acuan dalam hidup di tengah keragaman. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam menyikapi keragaman beragama dalam wujud dua sikap yang jelas dan tegas. Yaitu sikap eksklusif (*al-inghilaq*) dalam hal-hal yang bersifat aqidah dan *'ubudiah* dan sikap inklusif (*al-infithah*) dalam ranah sosial interaktif. Tataran aplikatif, ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah telah mengajarkan kepada umatnya hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang berbeda keyakinan. Piagam Madinah adalah diantara bukti sejarah Islam sejak awal menginginkan terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Konteks ke-Indonesia-an, nilai-nilai luhur Al-Quran tersebut dapat dikembangkan dalam rangka menegakkan berbagai pilar yang perlu disepakati bersama dan diaktualisasikan untuk membangun kerukunan antarumat beragama. Diantara pilar-pilar tersebut adalah dengan meningkatkan sikap toleran yang benar, saling menghormati dengan penuh sikap kedewasaan dalam beragama, meningkatkan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi tujuan bersama dalam beragama, tanpa harus saling mencurigai dan memperkokoh tiga pilar kenegaraan (Pancasila, UUD 45 dan Bineka Tunggal Ika).

Kelompok ketiga artikel yang berkenaan dengan disiplin ilmu usul fiqh ditulis oleh Imron Rosyadi tentang pemikiran Asy-Syâtibî tentang *masalah mursalah*, merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. *Maslahah mursalah* ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, Al-Quran dan Al-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Salah satu ulama usul fikih yang mengembangkan dalil ini adalah asy-Syâtibî. Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik *masalah mursalah*, menurut asy-Syâtibî, dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata asy-Syâtibî, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan. Asy-Syâtibî mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu. Artikel yang berbasis disertasi Imron Rosyadi ini, menegaskan bahwa penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Sifat *dharûrî* di sini maksudnya sebagaimana kaidah: *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahurwa wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *hâjî* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *masalah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhff*). Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam dalil *masalah mursalah*, menurut asy-Syâtibî, dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata asy-Syâtibî, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

Artikel lain ditulis oleh Harno Purwanto berjudul “Strategi Mengislamkan Kembali Komunitas Kristen di Lereng Gunung Semeru Kabupaten Malang Jawa Timur”. Artikel berbasis penelitian ini menemukan data-data menarik tentang usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam untuk menarik kembali orang Kristen yang semula beragama Islam untuk kembali ke Islam lagi. Temuan dari penelitian ini adalah (1) sebab spesifik yang menjadikan warga Desa Wonoagung dan Tamansatriyan Kecamatan Tortoyudo Kabupaten Malang (lereng Gunung Semeru) adalah hadirnya tokoh pendeta Digdo yang mampu menarik simpati masyarakat. Sedangkan pada waktu tersebut umat Islam tidak memiliki tokoh yang dapat dijadikan panutan. Pembawaannya yang santun, luwes, dan memahami masyarakat telah menancap di hati sebagian warga dan sulit terlupakan meskipun mereka sudah kembali lagi masuk Islam. (2) Strategi yang telah diterapkan untuk mengislamkan kembali warga lereng Gunung Semeru adalah menerapkan strategi pendekatan dan pembinaan. *Tandhir* dari strategi tersebut berupa peningkatan komunikasi dengan anggota masyarakat, dialog keagamaan dengan warga Kristen, pemberdayaan kerabat *murtadin*, mengundang *murtadin* dalam kajian-kajian keislaman, penampungan dan pembinaan anak-anak *murtadin*, serta pemberian santunan dan hadiah. Semua strategi harus dilaksanakan dengan dilandasi akhlaq mulia dalam bermuamalah dengan warga.

Jurnal Profetika Kajian Studi Islam ini hadir dengan harapan memberikan wawasan keislaman dalam tataran normatif dan historis, sehingga umat Islam semakin tercerdaskan dan terbuka pemikirannya.

Selamat membaca.

**Redaksi**